

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 21 /PMK.07/2009
TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KUITA	NC				
	142	I / BUKTI PENERIMAAN AI	NGGARAN TI	RANSFER KE	DAERAH
Telah Terima dari	:	Direktur Jenderal Perbendaharaa		endahara Umum N	legara
Melalui Dit.PKN Sejumlah	:	Rp			
Terbilang	:				
			***************************************	***************************************	***************************************
Melalui BO III Sejumlah	:	Rp			
Terbilang	:			***************************************	

Untuk Keperluan		Pencairan Anggaran Transfer ke	Doorah TA 2000		
Office Neperical		Bulan :	Jacian IA 2000		
		Daerah :			
Dengan Rincian	:		7	•	•
	264	RAN TRANSFER KE DAERAH		JUMLAH	Diference Transport
and the second second second second		- ini-	emmera.	JUMLAN	Diterima Tanggal
KELSTRONOVOERO IBUNINBELIAL	U sties				
PB8 :			_		
врнтв :			: Rp	<u> </u>	1
DEUTO!			: Rp		
PPH:					
PPh Pasal 21			: Rp	······································	
PPh Pasal 25/29	_				
SUBJUMLAH PENYALURAN DBH F	AJA	K Bag.Pusat	: Rp		
beete Anatolisa barahari	MEN	VALPUNGUIRRE E CALAGO E PROP			ļ
Blaya Pungut PBB	10(49)				
PBB Bagian Daerah					<i>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</i>
BPHTB Bagian Daerah				***************************************	<i>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</i>
		K Bag.Daerah + Biaya Pungut PBB			
	*8834		Che Manager Construction		
NYMANTOKA SIKUKA WASANSA	NA SECTION AND PROPERTY.				i
***************************************			; Rp		
HERESDYANGER CONTRACTOR	- X X		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		
	THE SECTION	· 在一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的	Participation of the Control of the		
PERTAMBANGAN UMUM : Lanrent			_		1
					l .
Royalty					
Royalty			: Rp		
Royalty			: Rp		
Royalty		·	: Rp		
Royalty		·	: Rp : Rp		
Royalty		· >	: Rp : Rp : Rp : Rp		
Royalty			: Rp : Rp : Rp : Rp		
Royalty			: Rp : Rp : Rp : Rp : Rp : Rp		
Royalty	DA		: Rp : Rp : Rp : Rp : Rp : Rp		
Royalty			: Rp		
Royalty			: Rp		
Royalty		***	: Rp		
Royalty		***	: Rp		
Royalty			: Rp		
Royalty			: Rp		
Royalty			: Rp		
Royalty			: Rp		
Royalty			: Rp		
Royalty			: Rp		
Royalty			: Rp		
Royalty			: Rp		
Royalty			: Rp		
Royalty			: Rp		
Royalty		kening Kas Daerah sebagai berikut :	: Rp		
Royalty			: Rp		
Royalty	da Re	kening Kas Daerah sebagai berikut :> Nomor Rekening Nama Rekening Nama Bank	: Rp		I hulan yang bersangkutan
Royalty	da Re	kening Kas Daerah sebagai berikut :> Nomor Rekening Nama Rekening	: Rp		ı bulan yang bersangkutan
Royalty	da Re	kening Kas Daerah sebagai berikut :> Nomor Rekening Nama Rekening Nama Bank	: Rp		
Royalty	da Re	kening Kas Daerah sebagai berikut :> Nomor Rekening Nama Rekening Nama Bank	: Rp	dari BO iii selama satu	
Royalty	da Re	kening Kas Daerah sebagai berikut :> Nomor Rekening Nama Rekening Nama Bank	: Rp	dari BO iii selama satu	
Royalty	da Re	kening Kas Daerah sebagai berikut :> Nomor Rekening Nama Rekening Nama Bank	: Rp	dari BO iii selama satu	
Royalty	da Re	kening Kas Daerah sebagai berikut :> Nomor Rekening Nama Rekening Nama Bank	: Rp	dari BO iii selama satu	



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota *)menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran Tahapsebagai berikut :						
Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara						
Tahap I	:	Rp				
Tahap II	:	Rp				
Total	:	Rp				
Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Dae	rah					
Tahap Ini	:	Rp				
Kumulatif s.d Tahap Ini	:	Rp				
Sisa Dana DAK di Rekening Kas Umum Daerah		Rp				
Persentase Sisa Dana DAK	. :					

No.	Bidang	Pagu	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah)			Sisa Pagu
	bluarig	, ragu	Tahap sebelumnya	Tahap Ini	Kumulatif s.d Tahap Ini	0/34 / 495
1	2	3	4	5	6 = (4 + 5)	7 = (3 - 6)
1.	Pendidikan	-		-	-	
2.	Kesehatan Pelayanan Dasar	-		-		
3.	Kesehatan Pelayanan Rujukan	-		-		
4	Infrastruktur Jalan			-	-	
5.	Infrastruktur Irigasi	-				
6.	Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi			-	-	
7.	Prasarana Pemerintahan	<i>i</i> -			-	
8.	Kelautan dan Perikanan	-				
9.	Pertanian	-			-	
10.	Lingkungan Hidup	-		-	-	
	Keluarga Berencana	-			-	
	Kehutanan	-		-	-	
	Sarana Prasarana Perdesaan	-		-	•	
14.	Perdagangan	-		-		
	Jumlah	-			-	

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperlunn pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal Gubernur/Bupati/Walikota

NAMA

*) Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

BIRO UMUM

ttd. SRI MULYANI INDRAWATI

MENTERI KEUANGAN



SURAT PERNYATAAN PENYEDIAAN DANA PENDAMPING

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota *)						
menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota *)						
telah/akan *) menyediakan Dana Pendamping DAK sekurang-kurangnya 10% untuk						
masing-masing bidang dalam APBD/APBD-P*) Tahun Anggaran 2009.						
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.						

Tempat, tanggal..... Gubernur/Bupati/Walikota.....

MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI INDRAWATI

Nama

*) Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

NIP#6004110

Antofitie Subarto

BIRO UMUM

ttd.



PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 21 /PMK.07/2009 TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN

Pener	imaan dari Rekening Kas Umum Ne	gara			
	Tahap I	:		Rp	
	Tahap II	:		Rp	
	Tahap III	•		Rp .	
	Total	:		Rp	-
	Total	•		ΝÞ	
Nc.	Bidang	Pagu	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah)	Sisa DAK di Kas Daerah	Realisasi Pelaksanaar Fisik Kegiatan s.d 31 Desember
1	2	3	4	5 = (3 - 4)	6
	Pendidikan				
	Kesehatan Pelayanan Dasar				
3.	Kesehatan Pelayanan Rujukan				
4.	nfrastruktur Jalan				
	Infrastruktur Irigasi				
	Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi				•
	Prasarana Pemerintahan	<u> </u>			<u> </u>
	Kelautan dan Perikanan				
	Pertanian				
10.	Lingkungan Hidup				
	Keluarga Berencana	······································			
	Kehutanan				
	Sarana Prasarana Perdesaan				
14.	Perdagangan		 		
	Jumlah			_	
		`		Tempat, Tanggal Gubernur/Bupati/Walik	ota
	*) Coret yang tidak perlu			Nama	
Salinan sesuai dengan aslinya,			MENTERI ttd	I KEUANGAN	

SRI MULYANI INDRAWATI

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

BIRO UMUM